PRAGMATISME PENDIDIKAN

Mata Kuliah:

FILSAFAT PENDIDIKAN

oleh:

HANIEF INSAN ARIF

NPM. 111180047

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

CIREBON

2012

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Beberapa kasus terakhir dalam dunia pendidikan kita yang terungkap antara lain kasus dugaan adanya kecurangan dalam ujian nasional (Unas) di SDN 06 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kasus contekan massal di SD Gadel II Surabaya, dan kasus contekan guru dalam sertifikasi di Jawa Barat menunjukkan mental bangsa kita yang lemah.

Kasus-kasus kecurangan dan kebohongan tersebut mencerminkan mental bangsa yang semakin memprihatinkan. Orientasi pendidikan yang menekankan pada tingkat kelulusan, tingginya nilai akademik, dan kualitas sekolah dengan embel-embel RSBI dan SBI membuat bangsa kita terancam tidak mempunyai generasi yang berkualitas. Minimnya pendidikan karakter di Indonesia juga mengakibatkan bangsa ini berjalan tanpa ideologi dengan hilangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dimiliki tiap-tiap daerah.

Pengaruh kapitalisme dan rendahnya pendidikan karakter yang masuk di dunia pendidikan mengubah masa depan dunia pendidikan hanya menjadi sebuah proses alat reproduksi produksi, di mana hilangnya mental bangsa dan hanya fokus pada penekanan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar (kapitalisme). Pragmatisme pendidikan ini terlihat dari kasus-kasus kecurangan di atas, murid maupun guru berlomba-lomba untuk (hanya) lulus dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau hanya mendapat pekerjaan.

Dunia saat ini terasa semakin cepat berputar. Perkembangan zaman yang semakin cepat tentu juga memberikan pengaruh pada penduduk dunia. Saat ini semua hal semakin dituntut untuk serba cepat, sehingga kinerja harus semakin efektif dan efisien. Oleh karena itu kita menjadi semakin pragmatis dalam menghadapi masalah yang ada.

B. PERMASALAHAN

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan fungsi pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 jelaslah bahwa pendidikan merupakan sarana pengembangan diri menjadi manusia yang manusiawi. Mencetak manusia yang bermartabat serta berakhlak mulia, sekaligus berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Oleh karena itu, pendidikan harus menyertai proses transfer ilmu pengetahuan ke dalam diri siswa agar siswa tidak hanya beroleh pengetahuan sebagai bekal bagi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan diri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tersebut secara beradab dan bermartabat.

Esensi pendidikan nasional yang termaktub dalam undang-undang mulai memudar. Pendidikan tidak lagi mengawal perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal yang lebih memilukan, pendidikan sudah mengikuti orientasi perkembangan pengetahuan dan teknologi yang lebih mengutamakan pragmatisme. Pendidikan tidak lagi menjadi kontrol utama perkembangan pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Kapitalisme, pragmatisme, dan bahkan cenderung apatis mulai merasuki jiwa pendidikan nasional. Peraturan perundangan nasional hanya sebagai teks biasa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Moralitas pendidikan dan pendidik serta terdidik menurun drastis.

BAB II
PRAGMATISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN

A. MENGENAL PRAGMATISME

Pragmatisme pada dasarnya merupakan gerakan filsafat Amerika yang begitu dominan selama satu abad terakhir dan mencerminkan sifat-sifat kehidupan Amerika. Demikian dekatnya pragmatisme dangan Amerika sehingga Popkin dan Stroll menyatakan bahwa pragmatisme merupakan gerakan yang berasal dari Amerika yang memiliki pengaruh mendalam di dalam kehidupan intelektual di Amerika. Bagi kebanyakan rakyat Amerika, pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran, asal dan tujuan, hakikat serta hal-hal metafisis yang menjadi pokok pembahasan dalam filsafat Barat dirasakan amat teoritis. Rakyat Amerika umumya menginginkan hasil yang kongkret. Sesuatu yang penting harus terlihat kegunaannya. Oleh karena itu, pertanyan *what is* harus dieliminir dengan *what for* dalam filsafat praktis.

Pragmatisme (dari bahasa Yunani: *pragma*, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan) merupakan sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James (1842 – 1910) di Amerika Serikat. Menurut filsafat ini, benar tidaknya suatu ucapan, dalil atau teori semata-mata bergantung pada manusia dalam bertindak. Istilah *pragmaticisme* ini diangkat pada tahun 1865 oleh Charles S. Pierce (1839-1914) sebagai doktrin pragmatisme. Doktrin dimaksud selanjutnya diumumkan pada tahun 1978.

Diakui atau tidak, paham pragmatisme menjadi sangat berpengaruh dalam pola pikir bangsa Amerika Serikat. Pengaruh pragmatisme menjalar di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Salah satu tokoh sentral yang sangat berjasa dalam pengembangan pragmatisme pendidikan adalah John Dewey (1859 – 1952). Pragmatisme Dewey merupakan sintensis pemikiran-pemikiran Charles S. Pierce dan William James. Dewey mencapai popularitasnya di bidang logika, etika epistemologi, filsafat politik, dan pendidikan. Tulisan ini sendiri selanjutnya akan mendeskripsikan pemikiran John Dewey tentang pragmatisme pendidikan.

Pragmatisme sebagai suatu interpretasi baru terhadap teori kebenaran oleh Pierce digagas sebagai *teori arti.* Dalam kaitan dengan ini, dinyatakan:

> *"According to the pragmatic theory of truth, a proposition is true in so far as it works or satisfies, working or satisfying being described variously by different exponent on the view*".
> "Menurut teori pragmatis tentang kebenaran, suatu proposisi dapat disebut benar sepanjang proposisi itu berlaku [*works*] atau memuaskan [*satisfies*], berlaku dan memuaskannya itu diuraikan dengan berbagai ragam oleh para pengamat teori tersebut".

B. TOKOH PENDIRI ALIRAN PRAGMATISME

Membicarakan pragmatisme sebagai sebuah paham dalam filsafat, tentu tidak dapat dilepaskan dari nama-nama seperti Charles S. Pierce, William James dan John Dewey. Meskipun ketiga tokoh tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aliran pragmatisme, namun diantara ketiganya memiliki fokus pembahasan yang berbeda. Charles S. Pierce lebih dekat disebut filosof ilmu, sedangkan William James disebut filosof agama dan John Dewey dikelompokkan pada filosof sosial. Filsafat pragmatisme muncul bersamaan dengan munculnya tokoh di Amerika yang lahir pada tahun 1842, yaitu William James. Tokoh lain dalam paham ini adalah John Dewey dan F.C.S. Schiller.

William James berusia sekitar 68 tahun (1842-1910). James adalah guru besar di Universitas Harvard dari tahun 1881 sampai dengan tahun 1907. Ia menentang teori filsafat materialisme tentang alam. Ia juga telah memaparkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode metafisika. Selain itu, dirinya juga menolak teori dialektika. Namun di sisi lain, ia menegaskan dukungannya terhadap doktrin *irrasionalisme* dan menguatkan analisanya tentang akal yang dinilainya sebagai aliran-aliran kesadaran. James banyak terpengaruh oleh C.S. Pierce. Hasil karyanya yang terkenal adalah "*Pragmatisme*" (1907). Tokoh ini juga berjasa dalam bidang lain, terutama dalam bidang psikologi. Hasil karyanya yang lain adalah bukunya yang berjudul *"The Meaning of Truth"*.

Tokoh yang sejalan pemikirannya dengan William James adalah John Dewey yang hidup antara tahun 1859 – 1952. Tokoh asal Amerika ini memiliki pengaruh yang sangat luas di bidang kajian ilmiah. Problematika nilai merupakan

konsentrasi utama kajiannya. Puncak kajiannya adalah revolusi di bidang pendidikan. Berbagai program pendidikan yang dinilai Dewey sebagai kriteria pendidikan yang maju dan progressif adalah kesimpulan alami dari keseluruhan filsafatnya. Dewey banyak terpengaruh oleh pemikiran C.S.Pierce.

C. PRAGMATISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

Pendidikan adalah proses penyesuian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual, dan jasmaniah manusia oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Allah Yang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir.

Ahmad D. Marimba mengatakan bahwa,

> "Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap si terdidik dalam hal perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama".

Pendidikan berguna untuk membina kepribadian manusia. Dengan pendidikan maka terbentuklah pribadi yang baik sehingga di dalam pergaulan dengan manusia lain, individu dapat hidup dengan tenang. Pendidikan membantu agar tiap individu mampu menjadi anggota kesatuan sosial manusia tanpa kehilangan pribadinya masing-masing. Sejak dahulu, disepakati bahwa dalam pribadi individu tumbuh dua kekuatan yaitu : kekuatan dari dalam (kemampuan-kemampuan dasar), Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan istilah "faktor dasar" dan kekuatan dari luar (faktor lingkungan), Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan istilah "faktor ajar".

Teori konvergensi yang berpendapat bahwa kemampuan dasar dan faktor dari luar saling memberi pengaruh, kedua kekuatan itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Si pribadi terpengaruh lingkungan, dan lingkungan pun diubah oleh si pribadi. Faktor-faktor intern (dari dalam) berkembang dan hasil perkembangannya digunakan untuk mengembangkan pribadi di lingkungan. Faktor dari luar dan lingkungan terkadang tidak berkembang dengan baik,

misalnya ketika pribadi terpengaruh oleh hal-hal negatif yang timbul dari luar dirinya.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan manusia yang berkualitas yang dideskripsikan dengan jelas dalam UU nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dan GBHN 1993, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani, berjiwa patriotik, cinta tanah air, mempunyai semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, menghargai jasa pahlawan, dan berorientasi pada masa depan.

Peran pendidikan dasar adalah penanaman nilai mendasar yang membentuk karakter kepribadian generasi, pendidikan menengah menyiapkan generasi memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan masyarakat, dan pendidikan tinggi membentuk generasi memiliki kompetensi dan keahlian profesional yang diarahkan untuk kepentingan strategis bangsa yang lebih luas. Sinergi ketiga jenjang tersebut secara berkesinambungan – jika negara memiliki visi dan paradigma kuat – akan melahirkan generasi dengan kualifikasi pemimpin.

Meski demikian suatu sistem pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh warna kebijakan dan perangkat sistem negaranya. Sistem politik dan ekonomi punya pengaruh signifikan terhadap visi dan paradigma negara dalam mendesain sistem pendidikannya. Sistem politik pemerintahan yang fungsinya memimpin dan melindungi rakyat, dan sistem ekonomi yang fungsinya mengelola sumber daya ekonomi untuk menyejahterakan rakyat tentu akan menentukan bagaimana sebuah sistem pendidikan itu didesain dan dijalankan.

Begitupula yang terjadi di negeri ini, sistem politik ekonomi yang diterapkan jelas sangat memengaruhi sistem pendidikannya. Ketika sistem politik diwarnai pragmatisme politik yang kental dan sistem ekonomi memiliki tata kelola SDA yang kapitalistik dan tidak menyejahterakan rakyat, maka yang terjadi justru dengan mudahnya arus pragmatisme merasuki sistem pendidikan nasional

di semua jenjang, bahkan dari tingkat dasar. Lompatan-lompatan kebijakan selama dua dekade terakhir, membawa pergeseran signifikan bagi kualitas generasi kita ke arah perusakan. Sikap pemerintah yang sekadar mengikuti arus global dan sistem pendidikan nasional yang miskin visi hanya mengarahkan penciptaan kapasitas peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pasar atau industri.

Jika kita menilik kondisi generasi yang ada di Indonesia, maka nampaknya masih jauh dari gambaran generasi berkualitas. Pada level akar rumput kita dapati banyak terjadi konflik horisontal baik yang dilakukan pelajar bahkan mahasiswa, serta pudarnya pergerakan mahasiswa yang kritis, cerdas, dan pro rakyat. Sementara di tingkat elit, fenomena munculnya pemimpin-pemimpin muda tanpa integritas pada pentas politik adalah problem serius. Walhasil, di negeri ini sangat langka mendapati sosok pemimpin berintegritas yang bisa melindungi rakyat. Seluruh realita ini bukan lagi sekadar kasus rendahnya kualitas, namun mengindikasikan secara sistemik bangsa ini telah kehilangan generasinya yang berkualitas.

Memang benar suatu bangsa membutuhkan sumber daya manusia untuk mengisi kebutuhan industri. Namun harus dilandasi dengan bangunan mentalitas yang benar dan berdasar kepada kekuatan visi negaranya. Krisis kepemimpinan yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari orientasi pendidikan kita yang hanya memenuhi tuntutan pasar global akibat dari sistem pendidikan nasional yang miskin visi. Sehingga generasi yang dilahirkan dari sistem ini adalah generasi yang tidak berkarakter yang hanya mengikuti dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Maka bangsa kita tak lebih dari bangsa pekerja.

Pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan pasar bebas berarti telah menjadikan pendidikan layaknya komoditas yang diperdagangkan. Pendidikan kemudian tunduk pada hukum pasar dan logika bisnis yang bertumpu pada pola pikir materialistik, kapitalistik, dan pragmatis. Berbagai komponen pendidikan seperti visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, manajemen pengelolaan, dan berbagai komponen pendidikan lainnnya harus tunduk pada hukum pasar dan logika bisnis. Selain itu, pendidikan yang dijual tersebut harus

mendapatkan pengakuan dari lembaga internasional yang kredibel, melalui sertifikat akreditasi yang diakui (*recognize*).

Kemudian, terhadap kondisi pendidikan seperti itu, dapat dibuat suatu penilaian sementara bahwa dunia pendidikan sedang mengalami krisis. Dalam artian bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan tidak mampu menangkal kecenderungan global ekonomi kapitalistik yang bersifat material hedonistik, bahkan telah tercemari olehnya. Ketidakmampuannya itu karena kehidupan sosial politik dan hukum tidak memberikan kontribusi, namun justru larut dalam moralitas hedonisme-materialistik. Tanpa dukungan moralitas demokrasi dan keadilan, tidak mungkin pendidikan mampu menjalankan visi dan misinya.

BAB III
SIMPULAN

Pendidikan sebagai suatu proses ke arah yang lebih baik tentunya tidak ingin terkotori dengan sistem pendidikan yang bersifat praktis pragmatis, hingga menghancurkan generasi bangsa di masa mendatang. Perlu adanya sebuah solusi dalam mengatasi masalah kemerosotan nilai-nilai pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia.

Pendidikan harus dikembalikan pada fungsinya semula sebagai pengawal perkembangan pengetahuan dan teknologi. Prinsip pragmatisasi pendidikan dan kapitalisasi pendidikan perlu direduksi agar keadilan sosial pendidikan dapat diraih. Pemerataan pendidikan dapat meminimalisir kapitalisme karena kapitalisme pendidikan pada dasarnya muncul karena tidak adanya pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, komponen keadilan sosial yaitu reduksi prasangka dan pedagogis ekuitas perlu digiatkan kembali.

Reduksi prasangka sendiri dimaknai sebagai aktivitas yang dapat diimplementasikan guru di kelas untuk dapat mengeliminasi pandangan negatif terhadap orang lain. Dalam hal ini, siswa diajarkan untuk berpikir dan menilai seseorang secara positif. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki pemikiran yang positif terhadap segala sesuatu. Hal-hal yang negatif dalam dunia pendidikan harus ditinggalkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan sehingga sifat praktis pragmatis dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat ditinggalkan.

Sedangkan pedagogis ekuitas adalah modifikasi proses pengajaran dengan memasukkan materi dan strategi pembelajaran yang tepat untuk anak laki-laki, perempuan dan semua kelompok. Dalam hal ini, guru harus lebih memaksimalkan kembali proses belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Materi yang disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang tepat dapat menghasilkan output yang relatif lebih baik. Guru menjadi sentral dalam perbaikan pendidikan di Indonesia. Untuk itulah guru diharuskan mempunyai strategi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia.